



EDISI | AGUSTUS TAHUN 2018

SIGANA



Gua Eek Luntie

HAL...3

SIAGA BENCANA / BPBA

KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN



Aktifkan pengawasan terhadap indikasi adanya kebakaran hutan dan lahan. Lakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkannya apabila terjadi kebakaran



Mencegah Lebih Baik daripada Memadamkan



Berbenah Menuju Aceh Green

HAL...2



Tahukah Anda Siapa Kepala BPBA

HAL...11



100 Hari Kerja Kalak BPBA

HAL...12



REDAKSI :

Editor Senior:
M Nasir Nurdin

Anggota:

Said Ashim, M Syahril, Bobby Syahputra,
Fadmi Ridwan Mukhsin Syafii, Iskandar,
Ibnu Sakdan, Teuku Alkausar, Amarullah,
Yudhie Satria, Fazli, Ahmad Fauzi, Idawati Arsyad

Keuangan:
Wiwik Aryati

Distribusi:
Miftah M

Desain Grafis:
Heryanto, M Yudi

Fotografer:
Ihwan Julmi

Sekretariat:
Pusdatin BPBA
Pusdatin.bpba@gmail.com
Telp/fax (0651) 34783

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat berjumpa kembali dengan **SIGANA**, Tabloid Siaga Bencana Aceh, mengapa bertemu kembali, hampir lima tahun **SIGANA** tidak terbit lagi. Awalnya **SIGANA** diterbitkan BPBA atas dukungan dari WFP yang waktu itu sedang melakukan pendampingan BPBA yang baru berumur jagung.

Edisi perdana tahun 2018 mengangkat isu kebakaran hutan dan pembenahan kinerja yang dilakukan BPBA selama seratus hari kerja Kepala Pelaksana HT Ahmad Dadek, SH yang dilantik tanggal 16 April 2018.

Dadek dilantik oleh Gubernur Aceh melalui Wakil Gubernur dan pejabat pertama yang dilantik dari hasil fit and proties yang dibuka sejak pertengahan tahun 2017 Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.

Nova Iriansyah mengatakan para pejabat yang dilantik telah melewati fit and proper test yang dilakukan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) beberapa waktu lalu. Begitu juga, tes terbuka itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Wagub berharap, pergantian itu dapat menciptakan birokrasi yang baik. Para pejabat dapat menciptakan inovasi secara cepat kreatif, inovatif dan taktis. Selain itu, Pemerintah Aceh dapat merumuskan hasil Musrenbang sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.

Untuk itu BPBA berusaha keras untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan penyusunan Renstra dengan melibatkan stakeholder yang ada. Selamat bekerja.

Selamat membaca.

FOKUS

Berbenah Menuju Aceh Green

Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah 2017-2022 telah menetapkan lima belas program unggulan, salah satunya yang berkaitan dengan kebencanaan adalah Aceh Hijau.

Aceh Hijau (Aceh Green) adalah penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam dengan konsep pembangunan antara lain: mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (Green growth plan) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh; melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat; membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah; membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymercomposite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

Adapun yang menjadi fokus Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Program Aceh Hijau ini adalah melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah. Ada Tiga Isu Besar Rpjma Aceh Hebat, pertama masih tingginya potensi bencana alam, banjir/genangan dan abrasi pantai, masih tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB), masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana, masih lemahnya langkah-langkah strategis dalam menyikapi perubahan iklim dan merupakan prioritas ke 8 Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan, bahwa dirinya

adalah pasangan dari Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf, dan akan tetap mendukung serta menjalankan program yang telah dimulai bersama Irwandi.

Hal tersebut disampaikan Aceh Nova Iriansyah saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal RI untuk Turki Herry Sudrajat beserta rombongan investor asal aturki, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Rabu (11/7/2018) pagi.

“Saya tegaskan, saya adalah partnernya pak Irwandi, bukan lawan politik karena kami dari partai pengusung yang sama dan bergerak dari harapan dan tujuan yang sama. Oleh karena itu tidak ada kebijakan politik yang berubah. Kami masih menunggu penyelesaian permasalahan yang sedang beliau hadapi, dan pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala,” kata Nova.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengharapkan agar Irwandi Yusuf bisa bebas secepat mungkin untuk melanjutkan kepemimpinan Pemerintahan Aceh dan menjalankan program Aceh hebat yang telah dicangkan sebelumnya.

Isu Strategis Lima Tahunan

1. **Mitigasi Bencana Belum Menjadi Budaya Masyarakat.** Kendatipun Aceh pernah dilanda bencana besar gempa dan tsunami 2004, namun budaya sadar bencana belum menjadi fokus dan bagian kehidupan masyarakat. Beda dengan di Jepang, bencana yang terjadi telah membentuk watak orang Jepang yang tahu apa yang harus dilakukan saat bencana, menimbulkan watak disiplin dan “kehadiran” bencana selalu diingatkan dalam setiap kehidupan mereka, lihatlah peringatan dan simulasi selalu terjadi di ruang publik orang Jepang. Karenanya BPBA berkewajiban membentuk karakter manusia lewat penerbitan Pergub tentang apa dan bagaimana sikap masyarakat yang harus diambil saat terjadi bencana, simulasi/drill yang harus intens dan kegiatan lainnya

untuk menumbuhkan sadar bencana masyarakat baik aspek pencegahan maupun penanggulangan.

2. **Kebakaran Lahan Dan Hutan yang kerap terjadi.** Hampir saban tahun di Aceh terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang paling banyak adalah kebakaran lahan gambut yang berpusat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Abdya, Aceh Besar. Kebakaran tersebut paling banyak disebabkan kesengajaan untuk membuka lahan perkebunan. Upaya pemadaman kendatipun dengan Helikopter hanya memberikan sedikit daya guna, pencegahan dan penegakan hukum lebih efektif. Penegakan hukum sudah dimulai dimana Aparat Polres Aceh Selatan menahan empat warga atas tuduhan membakar lahan di kawasan Suaka Margasatwa Gampong Ie Mudama, Kecamatan Trumon, 14 Februari 2018. Keempat warga yang telah berstatus tersangka itu adalah, MA (49), warga Gampong Sigleng, Kecamatan Trumon, NY (42) warga Pulo Raya, Kecamatan Trumon, AI (30) warga Sigleng, Kecamatan Trumon, dan MA (46) warga Gampong Krueng Batee, Kecamatan Trumon Tengah. (serambinews.com/http://aceh.tribunnews.com/2018/03/02. Kemudian upaya meningkatkan kapabilitas SDM dan peralatan juga sangat penting. Selama ini BPBD dan BPBA belum memiliki alat pompa bertekanan tinggi portabel. Kemampuan pemadam kebakaran kita hanya untuk kepentingan pemukiman.
3. **Keterjangkauan WMK Pemukiman yang masih terbatas.** Diperhitungkan kemampuan Wilayah Manajemen Pemukiman baru sekitar 60 persen, ini artinya hanya 60 persen wilayah Aceh yang dapat dijangkau oleh Mobil Pemadam Kebakaran dalam lima belas menit. Masalah lainnya adalah kapabilitas pemadam kebakaran yang masih terbatas dan kurang disiplin serta belum disertifikatkan dan sebagian besar mereka adalah tenaga kontrak yang perlu diupgrade termasuk kemampuan mereka merawat peralatan yang ada.
4. **Rendahnya Respon Masa Tanggap Darurat.** Karena diperlu peningkatakan kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan khususnya tanggap darurat, mempertajam kemampuan Tim Reaksi Cepat, manajemen logistik harus

diperkuat saat masa panik.

5. **Koordinasi Antar Lembaga Penanggulangan Bencana perlu diperkuat.** Masalah penanggulangan bencana bukan hanya masalah ketika bencana terjadi tetapi harus dibangun sinergitas saat sebelum bencana terjadi terutama dengan Forum PRB, BPBD kota/kota.
6. **Peningkatan Peran Ilmuwan/ Peneliti. Mereka harus diposisikan sebagai pemberi peringatan Terhadap Resiko Bencana yang akan terjadi, karenanya kerjasama dengan pusat penelitian dan gempa tsunami Aceh sangat penting (TDMRC)**
7. **Pemberdayaan Dunia Usaha sangat penting.** Terutama dunia usaha harus didorong untuk melakukan Simulasi di Sarana Publik Dan Partisipasi dalam bidang CSR terutama pemanfaatan dana CSR.
8. **Pemberdayaan lembaga mitra** terutama TNI, Polri, SAR, RAPI, Orari dan organisasi sosial yang konsern terhadap bencana.
9. **Peningkatan kapasitas SDM dan perawatan dan kesiap siagaan peralatan bencana seperti manajemen rescue, perahu karet dan lainnya.**
10. **Mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran darurat bencana.** Aceh belum memiliki baik mekanisme maupun dananya.
11. **Belum terimplementasi Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Aceh.** RPB dan RAD juga sudah habis masa berlakunya dan belum dilakukan evaluasi (program belum terpadu)
12. **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang bencana.** Perlu ditingkatkan simulasi, relawan, sekolah siaga bencana dan desa tangguh.
13. **Belum termanfaatkannya dana desa untuk mitigasi bencana.** Terutama untuk desa tangguh dan peralatan tanggap darurat.
14. **Belum terpadunya perencanaan dalam penanggulangan masalah bencana** (master plan per wilayah kebencanaan)
15. **Partisipasi publik masih rendah,** terutama partisipasi perempuan, anak-anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. (ketika bencana terjadi, korban terbanyak adalah dari kelompok ini, perencanaan dan penganggaran masih buta/netral, data belum terpilah).



Gua Eek Luntie

■ Perekam Tsunami Aceh 7400 Tahun Lalu

Di pesisir Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Gampong Meunasah Lhok—berjarak sekitar 48 kilometer arah barat Banda Aceh—ada satu gua di tebing gunung yang tak jauh dari bibir pantai, yang oleh masyarakat setempat dinamakan Guha Eek Luntie. Dinamakan Guha Ek Luntie bisa jadi karena secara turun temurun gua (gua) tersebut dikenal sebagai tempat bersarangnya luntie (kelelawar) dan masyarakat setempat memanfaatkan kotoran (eek) kelelawar yang jatuh ke hamparan pasir di dalam gua sebagai pupuk tanaman. Pascatsunami 2004, Guha Eek Luntie yang sebelumnya hanya dikenal sebatas sarang kelelawar dan tempat masyarakat mengumpulkan kotorannya menjadi pupuk, berubah menjadi objek penelitian.

Peneliti dari Earth Observatory of Singapore, Charles Rubin mengklaim telah menemukan jejak tsunami purba yang terjadi di Aceh. Temuan berharga ini, bisa menjadi petunjuk untuk memprediksi kapan peristiwa serupa itu akan terulang. Apakah dalam rentang waktu berabad-abad, atautkah hanya berselang beberapa dekade saja? Adapun informasi berharga ini, diperoleh dari temuan sebuah gua yang lokasinya tak jauh dari sumber tsunami dahsyat yang dipicu gempa besar pada 2004 lalu. Di gua tersebut, terdapat jejak-jejak gelombang besar yang diperkirakan berusia sekitar 7500 tahun.

Ini merupakan petunjuk berharga yang bisa menjadi sumber prediksi siklus bencana. Temuan itu disebutkan memiliki jejak rentetan siklus tsunami aling rinci yang terjadi dari ujung barat Pulau Sumatera di Aceh. Di tempat inilah, bencana dahsyat berupa gelombang tsunami setinggi 30 meter pernah meluluhlantakan Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Tsunami itu, dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 9,1 SR. Akibatnya, 230 ribu orang dilaporkan tewas. Dari jumlah itu, setengah diantaranya berada di Aceh yang menjadi kawasan terparah akibat tsunami ini.

Gua yang terbentuk dari kapur ini, terletak hanya beberapa ratus meter saja dari pantai yang berada di Banda Aceh. Gua ini terlindungi dari badai dan angin, hanya gelombang besar

yang menggenangi kawasan pesisir saja yang mampu menyemburkan api hingga ke dalam gua.

Bermula tahun 2011 lalu, para peneliti juga menemukan deposit pasir dari dasar laut yang tersapu hingga ke dalam gua. Pasir ini tersimpan di dalam gua selama ribuan tahun, dan diketahui membentuk susunan yang rapi berlapis yang bercampur dengan kotoran kelelawar. Namun bagi para peneliti, ini menjadi bukti penting bagaimana memetakan urutan waktu kejadian bencana tersebut. Yang mengejutkan, dari hasil perhitungan radio karbon terhadap sisa pasir, kulit kerang dan sisa organisme mikroskopis lainnya, peneliti menyebutkan bahwa ada 11 kali peristiwa tsunami yang sama sebelum terjadi tsunami tahun 2004

Charles menyebut bahwa yang terakhir, terjadi sekitar 2800 tahun yang lalu. Namun ia juga memprediksi setidaknya ada empat kali tsunami dalam kurun waktu 500 tahun terakhir. Para peneliti yakin bahwa telah terjadi dua kali gempa dahsyat antara tahun 1393 dan 1450. Adapun, para peneliti masih terus mencoba menggali informasi untuk menentukan seberapa besar gelombang yang masuk hingga ke gua. Ia menambahkan bahwa temuan gua itu diketahui secara kebetulan lantaran bukan bagian dari kerja lapangan yang mereka rencanakan sebelumnya.

“Pesannya bahwa bencana seperti tahun 2004 lalu, bukan berarti tidak



akan terjadi dalam kurun waktu 500 tahun,” katanya. “Kami telah menyaksikan bahwa peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Namun saya tidak akan mengeluarkan peringatan bahwa gempa bumi benar-benar akan terjadi (dalam waktu dekat), namun itu menunjukkan bahwa rentetan waktunya sangat bervariasi,” ujarnya.

Charles Rubin menegaskan bahwa belum diperoleh petunjuk yang jelas tentang frekuensi tsunami yang terjadi atau kapan tsunami berikutnya akan terjadi.

Sementara itu, gempa dahsyat yang memicu tsunami pada 2004 lalu sangat mengejutkan para peneliti. Terutama lantaran adanya kesalahan memprediksi aktivitas seismik pada lapisan bumi yang terkenal tenang selama ratusan tahun. Dan sejak terjadi gempa bumi dahsyat dalam rentang waktu 500 tahun ke belakang, tidak ada sejarah lisan yang bisa membantu untuk memahami risiko itu.

Sejak peristiwa itu pula, para peneliti mulai fokus untuk mempelajari aspek-aspek kesejarahan di lokasi-lokasi yang rawan bencana. Mereka melakukan pengukuran terhadap sisa pasir, karang yang terangkat hingga pemetaan dengan menggunakan GPS.

“Temuan ini sangat penting,” ucap Katrin Monecke, profesor geosains di Wellesley College Massachusetts. Adapun dirinya telah melakukan penelitian deposit pasir tsunami yang ditemukan

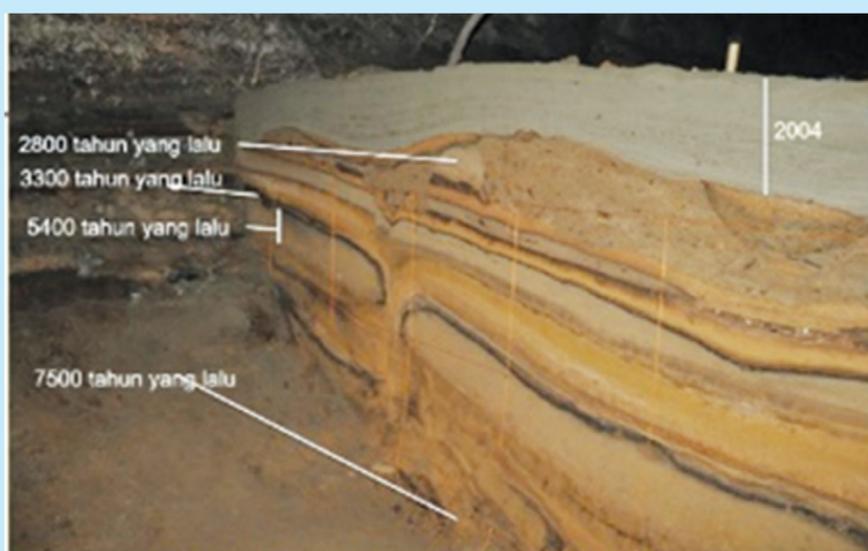
di daerah rawa-rawa. Namun ia sendiri tidak terlibat dalam penelitian dan temuan gua oleh peneliti dari Singapura. Temuan Katrin ini, kemudian disajikan dalam sebuah konferensi American Geophysical Union yang digelar di San Francisco.

“Lapisan pasir di gua memberikan gambaran rentang waktu yang sangat lama, dan memberikan petunjuk yang sangat baik mengenai frekuensi gempa yang pernah terjadi,” katanya.

Geolog Kerry Sieh yang merupakan direktur kelompok peneliti Singapura yang mengkaji jejak tsunami dalam gua meramalkan bahwa gempa dahsyat yang lain akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Gempa tersebut akan terjadi seiring dengan siklus gempa itu sendiri.

Terlebih, gempa tahun 2004 lalu telah mengakibatkan adanya tekanan yang lebih besar pada titik retakan. Namun begitu, sejarah sangat bervariasi, tidak mungkin ia membuat perkiraan yang tepat mengenai kapan gempa itu akan terjadi.

“Dengan mempelajari kejadian tsunami di masa lalu, mungkin kita bisa melakukan perencanaan dan mitigasi lebih matang untuk tsunami berikutnya,” demikian keterangan yang disampaikan Nazli Ismail, seorang Kepala Departemen Fisika dan Geofisika Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh yang juga tergabung dalam penelitian tersebut. ***



Bukti dari gua tsunami di Lhong Aceh Besar



Tradisi Tak Pernah Mati, Dari Simeulue Dengan Smong



Oleh: **Fikar W. Eda**
penyair

Pernyataan provokatif *tradisi never die* atau tradisi tak pernah mati, merupakan jawaban dari kegelisahan terhadap melunturnya identitas akibat desakan kebudayaan baru, bernama globalisasi. Kebudayaan globalisasi yang melahirkan paradoks, harus disikapi dengan penguatan jadi diri yang bersumber dari khasanah tradisi.

Globalisasi ditandai dengan makin padatnya lalu lintas pergaulan manusia dari berbagai belahan dunia, yang dihubungkan oleh satu jaringan komunikasi global. Interaksi komunikasi super canggih itu memungkinkan informasi atas sebuah peristiwa diperoleh dengan cepat dari berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Contoh paling mudah dari sistem komunikasi cepat seperti ini adalah teknologi *short message system* atau layanan pesan singkat, *facebook*, *yahoomessenger* dan berbagai produk jaringan internet lainnya.

Globalisasi menciptakan dunia baru, dunia tanpa sekat dan tanpa batas. Perang di Irak, Ledakan bom di Spanyol, pertikaian berdarah di Mongadisu, tsunami di Aceh, kemenangan Barack Obama di Amerika dan berbagai peristiwa dunia, dengan mudah segera disaksikan di belahan dunia lainnya, cepat, mudah, dan lengkap. Era global, adalah era yang memperlihatkan perubahan sangat cepat dialami masyarakat dunia.

Dalam bidang kesenian, napas globalisasi juga menyergap. Karya-karya kontemporer dengan berbagai bentuknya lahir di banyak tempat, termasuk Indonesia. Di tengah hiruk pikuk globalisasi itu, lantas dimana tempat yang bernama tradisi? Sastrawan Budi Darma dalam esainya *Sastra Kita; Estetika dan Teori* dalam "Restrospeksi dan Ancangan ke Depan," (2004:103), mengistilahkannya sebagai jalan pulang ke kampung halaman. Karena semakin jauh seseorang berjalan, ada saatnya makin rindu dia akan kampung halamannya.

Jalan pulang itu adalah jalan kembali ke tradisi, masuk ke dalam panorama kebudayaan yang berkembang di masing-masing suku dan daerah di Indonesia. Budi Darma mencontohkan dalam sastra, ada sastra Jawa, sastra Sunda, Minang, Kalimantan dan lain-lain.

Sudah pasti masing-masing kelompok masyarakat memiliki khasanah tradisi sendiri-sendiri, yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Pandangan ini diutarakan Adolp S Tomars dalam *Class System and The Arts* yang dikutip RM Soedarsono dalam "Seni dan Pariwisata" (1995:157), bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kesenian (tradisi) sesuai dengan ciri dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Tradisi, seperti diutarakan Poppy Savitri, saat menjabat Direktur Tradisi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, didefinisikan sebagai kebiasaan turun-temurun dari kelompok/komunitas/masyarakat tertentu berdasarkan nilai budaya kelompok/ komunitas/masyarakat

bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana pewarisnya bertingkah laku, berkarya, mencipta, mengekspresikan perasaannya, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kebutuhan pewarisnya. Dalam tradisi terdapat konvensi yang menjadi pedoman atau anutan. Pelanggaran terhadap konvensi berarti pelanggaran terhadap tradisi. Berani melanggar tradisi berarti berani melanggar ketentuan atau kepercayaan yang berlaku dan pelanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial.

Prof Mursal Esten (1995:139) menyatakan lembaga pendidikan tinggi kesenian yang ada di Indonesia amat potensial untuk menjadi pusat-pusat kebudayaan dan kesenian dalam menjadikan tradisi sebagai akar budaya dan sumber penciptaan. Bertitik tolak dari pandangan ini, maka sudah sepantasnya seni tradisi yang begitu beragam di Indonesia menjadi sebuah kekuatan di tengah pergaulan globalisasi.

Menyadari hal itu, untuk menjamin keberlangsungan seni tradisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan meliputi pelestarian tradisi, perlindungan tradisi, pengembangan tradisi, dan pemanfaatan seni tradisi. Implimentasinya dalam bentuk inventarisasi (penelitian, pencatatan, data base), pengkajian, revitalisasi. Kebijakan itu didasarkan pada konstitusi UUD 1945 Pasal 32, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain; UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10; UU No. 32 Tahun 2004/ No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda); dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam tulisan ini, saya ingin memaparkan seni tradisi Smong dalam masyarakat Kabupaten Simeulue, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang telah menyelamatkan masyarakat pulau tersebut dari amukan gelombang tsunami, yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004.

Kabupaten Simeulue berada di sebuah pulau di Samudra Hindia. Pulau tersebut memiliki luas 2012 Km persegi dengan jumlah penduduk 80.279 jiwa. Pulau Simeulue dapat dicapai dalam tempo 1 jam penerbangan dari Bandara Polonia Medan menggunakan pesawat bermesin tunggal kapasitas 11 penumpang, atau 11 jam melalui jalur laut dari pelabuhan Meulaboh, Aceh Barat.

Seni Tradisi dan Lima Konsepsi

Bagai sebuah komando, penduduk Pulau Simeulue, Aceh, berhamburan menuju bukit atau tempat-tempat yang tinggi ketika mengetahui laut surut ratusan meter, beberapa saat setelah gempa besar 8,9 Skala Richter melanda Tanah Aceh, pada 26 Desember 2004. Benar saja, tak lama berselang, hampasan gelombang raya menerjang pemukiman penduduk dan melenyapkannya, rata dengan tanah. Peristiwa itu disebut tsunami atau dalam bahasa Simeulue disebut Smong, artinya air menggulung.

Berbeda dengan kawasan pesisir Aceh lainnya, terjangan gelombang raya itu telah menggulung ratusan ribu orang meninggal dunia, ratusan ribu lainnya hilang. Di Simeulue tujuh orang meninggal dunia.

Apakah itu sebuah keajaiban?

Sama sekali tidak. Masyarakat Simeulue memiliki tradisi peringatan dini tentang datangnya Smong dalam bentuk syair, yang dituturkan dari generasi-ke generasi. Syair itu berisi kisah Smong, lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Enggalmon sao surito
Inang maso semonan
Manoknop sao fano
Uwilah da sesewan*

*Unen ne alek linon
Fesang bakat ne mali
Manoknop sao hampong
Tibo-tibo maawi*

*Angelinon ne mali
Oek suruk sauli
Maheya mihawali
Fano me senga tenggi*

*Ede smong kahanne
Turiangda nenekta
Miredam teher are
Pesan navi da*

*Smong rume-rumemo
Linon uwak-uwakmo
Elaik keudang-keudangmo
Kilek suloh-sulohmo*

*(dengarlah suatu kisah
Pada zaman dahulu kala
Tenggelam suatu desa
Begitulah dituturkan*

*Gempa yang mengawali
Disusul ombak raksasa
Tenggelam seluruh negeri
Secara tiba-tiba*

*Jika gempanya kuat
Disusul air yang surut
Segeralah cari tempat
Dataran tinggi agar selamat*

*Itulah smong namanya
Sejarah nenek moyang kita
Ingatlah ini semua
Pesan dan nasehatnya*

*Tsunami itu air mandimu
Gempa itu ayunanmu
Petir itu gendangmu
Halilintar lampumu)*

Tradisi Smong serta merta dapat dikaitkan dengan lima konsepsi hakikat hidup yang menjadi indikator nilai.

Konsepsi Hakikat Hidup

Dikaitkan dengan konsepsi hakikat hidup, Syair Smong di atas memperlihatkan bentuk penghayatan atau hakikat hidup masyarakat Simeulue terhadap alam lingkungannya. Peristiwa alam berhasil masuk dalam ruang penghayatan yang sangat baik, sehingga memungkinkan Smong menjelma menjadi sistem peringatan dini kebencanaan.

Konsepsi Hakikat Karya

Smong adalah puisi atau syair. Tak diketahui pasti siapa yang menciptakannya. Masyarakat Simeulue menyebutnya sebagai warisan turun temurun. Syair Smong dibawakan dalam bentuk nyanyian dengan melodi tertentu. Itulah sebabnya, syair tersebut mudah lekat dalam benak masyarakat setempat.

Konsepsi Hakikat Waktu

Masyarakat Simeulue memperoleh pe-

ingatan dini (*early warning*) tentang tsunami melalui sastra tutur yang didendangkan turun-temurun berdasarkan pengalaman tsunami yang melanda Siemulu pada hari Jumat, 4 Januari 1907. Dikabarkan kala itu sejumlah desa hilang ditelan laut, korban berjatuhan. Jauh sebelum itu, pada 1833, tsunami juga menyerbu Simeulu sebagai efek domino dari letusan Gunung Krakatau yang membelah daratan Andalas dan Pulau Jawa. Artinya, peristiwa masa lalu yang kelam berhasil ditransformasikan dalam era sekarang dan masa depan dalam bentuk syair.

Hakikat Lingkungan Alam

Seperti sudah diutarakan di atas, bahwa Syair Smong merupakan refleksi dari keakraban terhadap peristiwa alam yang terjadi. Keakraban itu terjalin sedemikian rupa. Bahwa manusia harus mengenali lingkungan tempatnya hidup yang diekspresikan dalam bentuk seni tradisi lisan. Tsunami atau Smong, gempa, petir, halilintar adalah peristiwa alam yang menjadi keseharian masyarakat pulau tersebut.

Konsepsi Hakikat Lingkungan Sosial

Syair Smong telah berhasil mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan akibat bencana tsunami. Jatuhnya korban berhasil diatasi. Kuatnya penanaman smong dalam ingatan masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa fonem smong telah mengalami proses pengendapan yang lama sehingga lambat laun menjadi memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat. Dalam sistem masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan sampai tertanam menjadi memori kolektif masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media lisan.

Peristiwa-peristiwa alam inilah yang kemudian dinukilkan dalam sastra tutur yang didendangkan dari generasi ke generasi dan menjadi pesan kewaspadaan.

Masyarakat Simeulu menyebut tsunami dengan istilah Smong. Peristiwa 1907 membawa hikmah yang besar bagi generasi berikutnya. Peringatan tentang Smong ini dapat dilihat dalam salah satu syair yang dikenal betul oleh manusia Siemulue, berjudul Smong.

Ditinjau dari sisi linguistik, terbentuknya kata Smong, mungkin dengan teknik linguistik onomatope. Fonem smong cukup dekat dengan bunyi yang mendengung saat ombak menyerang bergulung-gulung. Di masyarakat Simeulue, fonem smong berarti ombak besar yang datang bergulung-gulung yang didahului oleh gempa yang sangat besar. Fenomena yang dikenal masyarakat dunia dengan istilah tsunami. Pemahaman tentang smong ini tertanam kuat dalam memori masyarakat Simeulue dari anak-anak sampai orang tua.

Kuatnya penanaman Smong dalam ingatan masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa fonem Smong telah mengalami proses pengendapan yang lama, sehingga lambat laun menjadi memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat. Dalam sistem masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan sampai tertanam menjadi memori kolektif masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media lisan.

Dalam kaitan ini R.M Soedarsono (2003: 172) menyebutkan bahwa seni memiliki fungsi sekunder cukup banyak jumlahnya, diantaranya sebagai pengikat solidaritas sekelompok masyarakat. Begitulah Smong, telah berhasil mengikat masyarakat Simeulue dalam satu sistem nilai. (*)



Kebakaran Lahan dan Hutan

■ Mencegah Lebih Baik daripada Memadamkan ■

Bulan Juni 2018 ini, kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya. Penyebab sebagian besar memang karena disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. BPBA bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menggelar rapat untuk mencegah kebakaran yang lebih besar dan melakukan upaya pemadaman terutama dengan BPBD dan KPH yang ada di Kabupaten tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini melanda wilayah barat selatan Aceh sejak Juni dan dapat padam pada saat hujan di Bulan Juli Yang memrihatinkan, kebakaran lahan gambut di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, serta kebakaran lainnya di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, dilaporkan terus meluas dan sulit dipadamkan, meski pihak badan penanggulangan bencana di daerah itu terus bekerja keras memadamkannya.

Luas areal yang terbakar, di Aceh Serlantan saja sudah mencapai lebih 20 hektar. Api yang terus meluas kian mengancam perkebunan masyarakat serta kebun sawit milik perusahaan swasta di wilayah Kecamatan Bakongan. Sedangkan cuaca di kawasan itu masih panas terik disertai angin yang membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan.

Di Aceh Barat kebakaran mulai terjadi 8 Juni 2018 di lokasi Gampong Cot Puleh, Samatiga, dan Gampong Leuhan, Johan Pahlawan, seluas 10 Ha, masih dalam

penyelidikan pihak berwajib, namun berdasarkan keterangan masyarakat lahan sudah terbakar pada hari Sabtu 9 Juni di Desa Cot Puleh, dan pada Minggu 10 Juni di Leuhan.

Menanggapi kondisi itu, Gubernur Irwandi Yusuf menginstruksikan semua pihak melakukan upaya pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Irwandi berharap instruksinya dijalankan secara tegas mengingat kian tingginya potensi kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau yang sedang mendera sejumlah wilayah Aceh ini.

Gubernur menerima laporan, sampai dua hari lalu, titik api (hotspot) sudah muncul di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Subulussalan. "Penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pelaku pembakar hutan dan lahan," kata Irwandi.

Gubernur juga memerintahkan tim BPBD, KPH, TNI/Polri agar mengantisipasi

terjadinya kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dengan menggerakkan seluruh jajaran sampai tingkat desa. Irwandi minta pengawasan secara aktif terhadap indikasi adanya kebakaran hutan dan lahan. "Lakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkannya apabila terjadi kebakaran," katanya.

Para Bupati/Wali Kota juga diinstruksikan supaya mengoordinir semua potensi daerah sampai persiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antarpihak baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, LSM, dan masyarakat.

Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun ini, sudah terbukti penyebabnya lebih banyak faktor kesengajaan. Yakni, ada pelaku yang sengaja membakar lahan. Di antara banyak pelaku itu, sedikit di antaranya pernah ditangkap. Ada yang sampai ke pengadilan dan akhirnya menerima hukuman ringan. Itulah antara lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang-ulang tiap tahun.

Padahal, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 miliar, maksimal Rp 10 miliar. Penegak hukum semestinya menjatuhkan sanksi maksimalnya, supaya memberi efek

mendalam terhadap pembakar hutan dan lahan. Inilah yang diharap gubernur agar kita tak lagi repot setiap tahun menghadapi kebakaran hutan.

Gubernur juga memerintahkan tim BPBD, KPH, TNI/Polri agar mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dengan menggerakkan seluruh jajaran sampai tingkat desa. "Aktifkan pengawasan terhadap indikasi adanya kebakaran hutan dan lahan. Lakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkannya apabila terjadi kebakaran," kata Irwandi.

Para Bupati/Wali Kota juga diminta mengkoordinasikan semua potensi daerah sampai persiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antarpihak baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, LSM, dan masyarakat.

"Para Bupati/Wali Kota agar mengintensifkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan kebakaran baik melalui penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan mengambil langkah-langkah yang tepat lainnya," katanya.

Apabila terjadi ancaman kebakaran dan potensi kekeringan di wilayah masing-masing, segera laporkan kepada Gubernur Aceh. Semua pihak juga harus memastikan semua sarana prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi siap pakai.

Perusahaan-perusahaan perkebunan



Rapat Tim Karhutla pada tanggal 8 Juli 2018 di Kantor BPBA yang merekomendasikan beberapa usulan kepada Gubernur dan BNPB untuk mendukung BPBD dalam upaya melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan baik di lingkungan perusahaan maupun di sekitar perusahaan.

Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBA menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanganan karhutla yang kini terjadi lagi di sejumlah wilayah Aceh.

Kalak BPBA, Teuku Ahmad Dadek kepada Serambi menginformasikan, rapat yang berlangsung Jumat (8/6) di Aula BPBA menghasilkan setidaknya enam poin kesimpulan untuk ditindaklanjuti.

Kesimpulan tersebut antara lain penanganan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Penetapan siaga darurat karhutla perlu adanya pernyataan dari kabupaten/kota dan prakiraan potensi serta pemetaan titik rawan dari BMKG. Diperlukan juga imbauan tentang penambahan sanksi pidana bagi pelaku karhutla.

Forum rapat juga merasa perlu membuat posko karhutla mulai tingkat provinsi sampai ke level kecamatan. Juga perlu dilakukan gelar pasukan dan peralatan di provinsi, kabupaten/kota secara berkala. Sedangkan pada poin terakhir direkomendasikan untuk mengundang perusahaan-perusahaan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi karhutla

Sementara itu, Kalak BPBD Aceh Selatan, Cut Sazalisma SSTP mengatakan ada Satu hal pembelajaran di lapangan yang kami review yaitu Kebakaran lahan gambut api berada diatas dan dibawah lahan gambut itu sendiri. Dilakukan teknik mematikan api diatas dg cara penyemprotan dan dibawah harus diputuskan (isolir) keliling yg sudah terbakar dipastikan terpisah

melalui pembuatan paret/kanal sehingga sampai lapisan bawah tidak lagi ada rambatan api.

Harus dilakukan pos pemantauan dilokasi kebakaran dapat dilihat langsung, krn setiap waktu api dapat membesar dipengaruhi tiupan angin,

Izin melaporkan bahwa di kec bakongan terpantau 3 titik hot-spot, yg terbesar sudah dapat kita atasi dan tadi malam operasi 3 hari kita tutup namun hari ini petugas kita di bakongan didukung muspika setempat masih terus mengatasi dilapangan krn secara total asap belum habis dimungkinkan akan aman bila hujan lebat mengguyur, termasuk malam tetap melakukan patroli.

Kapolres membackup tenaga dan kelancaran dalam penanganan

dilapangan serta sudah menginstruksikan utk melakukan penyelidikan terhadap proses penegakan hukum. Dandim menyiapkan personel dan membantu aktif dilokasi kebakaran. Situasi

dapat diperkirakan 85% tingkat aman, pengendalian dan penyelesaian di kec bakongan, sedangkan 15% adalah kondisi potensi masih sangat besar mengingat api dibawah gambut masih ada.

Apa yang Sudah Dilakukan BPBA

1. Memantau dan mendukung kinerja BPBD Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya yang melakukan upaya pemadaman
2. Membuat rapat Tim Karhutla dengan Kalak BPBA
3. Menerbitkan himbauan untuk pencegahan Karhutla
4. Gubernur intruksikan semua pihak siaga
5. Mengajukan Penerbitan SK Siaga Karhutla
6. Melaporkan ke BNPB untuk mendapatkan penanganan segera

Kendala

1. Peralatan kurang memadai seperti kekurangan Pompa Mobile, Slang dan lain sebagainya
2. Kekurangan alat berat dan biaya operasional





Suasana Family Day BPBA yang baru pertama kali selama delapan tahun dilaksanakan

Konsolidasi Kedalam Lewat Family Day

Family Day

- Diikuti 120 peserta
- Ada permainan anak-anak
- Dan mengundang Forum PRB, RAPI, Unsur Pengarah dan BPBA PNA

Dalam upaya membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan, BPBA melaksanakan Family Day atau kumpul keluarga pada tanggal 13 Mei 2018 yang dilaksanakan di Pantai Lhok Nga. BPBA juga mengundang beberapa stakeholder seperti unsur pengarah, Forum PRB, Rapi, BPBA PNA dan beberapa unsur lainnya. Acara tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

Dalam acara kumpul keluarga itu, Kalak BPBA mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Family Day ini dalam rangka membangun ukhuwah, terutama dirinya yang masih baru yang perlu mengenal semua anggota keluarga BPBA untuk membangun semangat tim. "Semoga kedepan kita lebih kompak dan semangat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana" ujar Dadek.

Acara dilanjutkan dengan perlombaan antar bidang dan juga melibatkan anak-anak dari anggota staf BPBA baik yang PNS maupun non PNS.

Satu hari setelah pelantikan, tepatnya tanggal 17 April 2018, Dadek melaksanakan apel dan pertemuan perdana dengan seluruh staf BPBA yang ada, dan pada bulan ramadhan juga dilaksanakan buka puasa bersama di Kantor BPBA disamping dihadiri para staf dan keluarga juga mengundang mitra kerja BPBA seperti Forum PRB, dan unsur lainnya.

Lebaran kali ini adalah lebaran dengan masa cuti yang cukup lama, karenanya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur jauh jauh hari sudah mengingatkan agar cuti tidak keblablasan, artinya hari pertama tidak ada PNS dan non PNS yang tidak masuk kerja, jika tidak masuk kerja dengan ancaman 50 persen Tukin dipotong. Dan Alhamdulillah seluruh BPBA semuanya hadir dan pemeriksaan dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintah, Sospol dan Hukum, Bapak Drs H Rachmat Fitri HD.



Tanggal 21 Juli 2018 hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama lebaran dan Tim Pengawasan yang dipimpin staf ahli bidang Hukum dan Pemerintahan, Drs H Rachmat Fitri HD melakukan pemeriksaan absen staf BPBA



KALAK BPBA, Teuku Ahmad Dadek menyerahkan santunan untuk anak yatim menjelang berbuka puasa bersama di Kantor BPBA, Banda Aceh, Senin (3/6). FOTO IST

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) juga menggelar buka puasa bersama dengan kalangan internal, anak yatim, dan stakeholder di halaman Kantor BPBA di Banda Aceh, Senin, 4 Juni 2018. Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek mengatakan budaya buka puasa bersama sekaligus silaturahmi sangatlah baik. Setidaknya melalui medium buka puasa bersama di bulan Ramadhan ini banyak manfaat yang dirasakan selain menjalankan perintah bersilaturahmi, iftar juga dapat memelihara, mendekatkan, dan mengakrabkan hubungan, mencairkan hubungan, membuka komunikasi dengan pihak lain, membuka hubungan baru, memudahkan rezeki, dan memperpanjang umur. Menurut Ahmad Dadek, upaya penanggulangan

bencana membutuhkan koordinasi yang baik antar-stakeholder juga kekompakan di lingkungan BPBA sendiri. Dadek berharap dengan digelarnya iftar ini, silaturahmi antarpegawai dan stakeholder BPBA dapat terjalin dengan erat dan pada akhirnya menjadi momentum koordinasi yang baik antarstakeholder sehingga upaya penanggulangan bencana di Aceh ke depannya menjadi lebih mudah, efektif, dan terarah. Saat-saat menjelang berbuka selain diisi dengan penyerahan santunan untuk 20 anak yatim dari lingkungan Kantor BPBA juga ceramah agama oleh Ustaz Umar Ismail. Dalam ceramah singkatnya, Ustaz Umar, dengan gaya khasnya yang dibumbui humor-humor segar menjelaskan tentang keutamaan shalat, puasa, dan sadakah.

BPBA memiliki dua lokasi utama di Banda Aceh, yang satu di Simpang Lima dimana Kantor BPBA terletak dan menjalankan tugas administrasi, koordinasi dan komando, Satu lagi gudang BPBA yang terletak dibelakang Stadion Lhong Raya bersebalahan dengan BNN. Satu minggu setelah pelantikan Dadek mengecek keberadaan peralatan dan logistik yang dimiliki BPBA dan nampaknya masih perlu pembenahan mulai dari rehab gudang sampai penambahan tempat cuci mobil dan workshop untuk pelatihan.

Karena BPBA dan BPBD kabupaten/kota juga melaksanakan pelayanan publik yang tidak boleh putus, maka dibentuklah piket Pusat Pengendali dan Operasi Pusdalob Aceh yang berjalan dengan tertib dan lancar kendatipun saat hari lebaran. **(Henny)**



Kepala Pelaksana BPBA makan bersama dengan anggota Gundang pada tanggal 15 Mei 2018 dan salah satu Ustad yang memberikan tausiyah pada bulan Ramadhan di Mushala BPBA.



Memperkuat Hubungan



Kepala Pelaksana BPBA mengikuti Musrenbangnas di Jakarta untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam upaya memperkuat kedudukan BPBA, baik vertikal maupun horizontal, Kalak BPBA, HT Ahmad Dadek melaksanakan serangkaian kunjungan terutama dengan pihak BNPB di Jakarta dan Dadek bertemu dengan Bapak Doddy Ruswandi MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB. Dalam pertemuan tersebut, Doddy memberikan ucapan selamat dan meminta Dadek untuk melakukan upaya-upaya besar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Aceh. Doddy susah mengenal Dadek sejak tahun 2011 ketika Dadek masih menjabat Kepala Pelaksana BPBD Aceh dan Pak Doddy selaku Deputi Kedarutan dan Logistik. Kunjungan itu dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2018 di Grana BNPB Jakarta.

Kemudian Dadek juga melaksanakan pertemuan dengan Bapak DR Sutopo Purwo Nugroho selaku Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Pak Topo demikian disapa memberikan beberapa wejangan agar Dadek melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana untuk lebih menitik beratkan pada kesiap siagaan dan membina hubungan baik dengan media. Dadek juga mengajukan beberapa proposal diantaranya sarana komunikasi dan meminta kepada Pak Topo agar BPBA dapat didampingi NGO asing untuk lebih memperkuat kelembagaan dan aturan BPBA.

Sementara itu, Kalak BPBA juga melaksanakan kunjungan kedua di BNPB yaitu untuk pembahasan Rencana Aksi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireun



Silaturahmi dengan Unsur Pengarah BPBA.



Pembahasan dan penjelasan tentang Index Risiko Bencana oleh Kalak BPBA kepada Kalak dan Kasubbag Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juli 2018 di Aula BPBA.



Rapat Koordinasi dengan Kalak BPBD se Aceh pada tanggal 23 April 2018 di Aula BPBA.



Kalak BPBA bersama Ketua TDMRC Bapak Dr. Khairul Munadi, M.Eng membahas beberapa isu penting untuk membangun kerjasama antara BPBA dengan para ilmuwan. Rapat pertama ini dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2018



Tanda tangan MOU antara Kalak BPBA, HT Ahmad Dadek, SH dengan Ketua TDMRC Dr. Khairul Munadi, M.Eng setelah dilaksanakan seminar tentang gempa 28 Mei 2018

pada tanggal 3 dan 4 Juli 2018. Di sela-sela pembahasan selama dua itu, Dadek bertemu dengan Dra Prashinta Dewi MAP Direktur Logistik dalam rangka mengucapkan terima kasih atas bantuan logistik untuk tahun anggaran 2018 senilai Rp, 450 juta dan sudah diterima BPBA pada tanggal 2 Juli 2018 malam. Kemudian Dadek juga bersilaturahmi dengan Bapak Rusdian Apt Mkes selaku Direktur Peralatan dan Dadek menyerahkan satu proposal komunikasi serta menanyakan kembali kepada beliau tentang rekomendasi yang dibutuhkan oleh Jica untuk mendapatkan bantuan peralatan dini.

Kalak BPBD

Konsolidasi dengan kabupaten/kota Kalak BPBA juga melaksanakan rapat koordinasi dengan Kalak Kabupaten Kota sebanyak empat kali yaitu pertemuan perdana tanggal 23 April 2018 untuk silaturahmi dan membahas masukan dari kabupaten/kota, kemudian pada acara pembagian tool index bencana, pembahasan Renstra BPBA serta yang terakhir workshop.

Pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek SH, menyarankan pihak BPBD kabupaten/kota agar pintar mengelola dan memanfaatkan dana kebencanaan yang ada di Aceh, baik yang bersumber

dari Dana Otonomi Kabupaten/Kota maupun dana yang ada di DPA BPBA. “Tidak semua BPBD Kabupaten/kota mendapat alokasi dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) padahal BPBD masih membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan seperti mobil pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran lahan, rescue dan lainnya, termasuk untuk fisik pembangunan gudang, pos pemadam kebakaran, gedung evakuasi, kendaraan rescue, kendaraan angkut relawan dan dapur umum,” kata Dadek ketika memimpin Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) BPBA 2018-2022 dengan BPBD Kabupaten/kota, Unsur Pengarah BPBA, Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh, dan RAPI Aceh di Aula Kantor BPBA, Banda Aceh, Selasa (26/6).

Teuku Dadek menjelaskan, sumber dana APBA dapat dimanfaatkan oleh BPBD dengan cara harus masuk melalui Musrenbang, kemudian syarat tanah, DED dan RAB juga harus ada, “Banyak BPBD kabupaten/kota yang tidak memanfaatkan Musrenbang untuk mendapatkan dana kebencanaan di APBA” kata mantan Ketua Bappeda Aceh Barat tersebut. “BPBD harus pintar mengelola dan memanfaatkan sumber dana termasuk yang ada di BNPB baik dana RR dan dana siap pakai” lanjutnya.

Dadek terus bergerak cepat dengan



Kiri, Bapak Sutopo bersama dengan HT Ahmad Dadek, SH dan Bapak Doddy sedang berbincang dengan Kalak BPBA pada tanggal 02 Mei 2018 dan Ibu Prashinta Dewi Direktur Logistik pada tanggal 03 Juli 2018.



membangun budaya sadar bencana dan peringatan dini dengan memanfaatkan ilmuwan sebagai salah satu pemberi peringatan. “Salah satunya kita sepakat untuk menggelar seminar rutin tentang kebencanaan bersama BPBA” ujar Munadi.

Sementara itu, Dr.



Nasir Nurdin
(Ketua Forum PRB)

Muksin Umar, Coordinator Geological Hazard TDMRC mengatakan bahwa masih banyak sesar di tenggara, utara Aceh yang belum kita miliki datanya, sementara alat yang tersedia sangat terbatas. “Karenanya dukungan semua pihak sangat dibutuhkan terutama untuk pengadaan seismometer,” ujar Muksin Umar.

Pada kesempatan itu, Kalak BPBA juga berkomitmen untuk memasukan pada tahun anggaran 2019 pengadaan seismoter dan pihak TDMRC juga akan bekerjasama dengan BPBA untuk mewujudkan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan.

BPBA Dorong Lahirnya Pergub PRB

Bersama dengan Forum PRB, Kalak juga sudah melaksanakan rapat penting terutama pembentukan forum PRB di seluruh Aceh. Selama ini ada tiga belas Forum PRB yang sudah terbentuk, namun tidak berfungsi sepenuhnya. “Padahal Forum ini sangat penting untuk pengelolaan potensi pengurangan risiko non pemerintah” ujar M Nasir Nurdin Ketua Forum PRB Aceh.

Sementara itu Kalak BPBA Teuku Dadek mengatakan bahwa Forum PRB wilayah yang belum tersentuh secara sistematis terutama menyangkut peran palagi pendanaan.

“Saya pikir Pergub PRB itu perlu segera digodok agar ada kejelasan bagi Forum PRB Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagaimana kemitraan dengan multipihak terkait pengurangan risiko bencana,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBA, Teuku Ahmad Dadek saat menerima audiensi dan diskusi dengan Pengurus Forum PRB Aceh, Selasa (22/5).

Menurut Dadek, Pergub PRB itu nantinya selain akan menjadi acuan yang jelas tentang peran Forum PRB sekaligus memungkinkan untuk menguatkan fungsi koordinasi dengan Forum PRB di Kabupaten/Kota. “Pergub itu nantinya juga memungkinkan mengatur bagaimana pola kerja sama antara Forum PRB Aceh dengan Forum PRB Kabupaten/ Kota,” kata Teuku Dadek.

Ketua Forum PRB Aceh, Nasir Nurdin mengatakan, tindak lanjut diskusi dengan Kalak BPBA, pihaknya langsung melakukan rapat internal untuk dua tugas utama yang harus segera dituntaskan yaitu upaya melahirkan draft Pergub PRB dan pembentukan Forum PRB Kabupaten/ Kota sebagai bagian untuk penguatan fungsi forum dalam tugas-tugas yang terkait pengurangan risiko bencana.

Pada pertemuan itu juga disepakati pendanaan untuk Forum PRB Aceh sekitar Rp. 600 juta untuk operasional di tahun 2018.

Pihak Terkait Lainnya

Kalak BPBA juga melakukan serangkaian kegiatan kerjasama lagi diantaranya pertemuan dengan Kepala SAR Aceh Hari Adi Purnomo SH. BPBA dan

SAR adalah dua lembaga dengan peran yang berbeda namun masa darurat adalah dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Jika BPBA dibentuk untuk menangani bencana bencana terjadi, masa darurat dan rehab rekon, maka SAR dibentuk untuk pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat dan kapallaut. SAR dibentuk sebagai kesepakatan internasional. Peran SAR sangat penting dalam upaya kedaruratan dan BPBA berhak meminta bantuan SAR untuk pencarian dan pertolongan pada saat kebencanaan.

Kalak BPBA juga sudah melaksanakan rapat tehnik dengan RAPI Aceh, dibawah pimpinan Sdr Rahmat Thaleb pada beberapa kesempatan. Dan keduanya menyepakati untuk membentuk Satgas Bantuan Komunikasi dan penempatan kegiatan komunikasi di BPBA mulai tahun anggaran 2018

Kalak BPBA juga melaksanakan kerjasama di lapangan pada saat dibutuhkan dengan Persatuan AFF dimana tergabung para penggemar Drone.

Untuk memperkuat kemitraan terutama dengan Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, Kalak BPBA melaksanakan serangkaian kunjungan dan dikunjungi. BPBD Aceh Besar dan BPBD Banda Aceh serta Kantor Pemadam Kebakaran Banda Aceh akan diikat kerjasama dalam satu MOU dimana sewaktu waktu BPBA membutuhkan SDM dan alat untuk penanganan gempa di daerah lain dari Aceh Besar dan Kota. “Kerjasama ini sangat penting, sebab alat dan SDM di BPBA sangat terbatas” ujar Dadek.

Kemitraan seperti ini juga harus ditiru oleh kabupaten kota yang bertetangga sehingga penanganannya lebih sistematis. “Aceh Barat harus tahu alat dan SDM apa yang dimiliki Nagan dan Aceh Jaya, demikian juga sebaliknya” ujar Dadek.

“Di kalangan relawan kebencanaan, nama Teuku Dadek sudah tak asing lagi. Selama memimpin BPBD Aceh Barat, misalnya, beliau telah mengukir beragam prestasi bukan saja untuk kepentingan lokal tetapi juga nasional bahkan internasional. Ide-ide beliau menjadi referensi dan sekaligus inspirasi di bidang penanggulangan bencana,” begitu tanggapan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh, Nasir Nurdin.

Nasir yang juga ketua organisasi relawan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh mencatat sejumlah prestasi Dadek, di antaranya pernah menjadikan BPBD Aceh Barat sebagai BPBD terbaik se-Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala BNPB, Letjen Syamsul Ma’arif pada 2012. Tak tanggung-tanggung, Dadek memenangkan tiga kategori dari 12 kategori yang dipertandingkan yaitu juara II tanggap darurat nasional, juara I pra-bencana tingkat nasional, dan juara I kesiapsiagaan nasional.

Teuku Dadek yang juga pernah bergabung sebagai wartawan Serambi Indonesia juga dikenal aktif dalam proses rehab rekons di Meulaboh yang dimulai dari dia menjabat camat bahkan sempat digelar sebagai fixer man oleh Banda UN karena berhasil melakukan konsolidasi rehab rekons dengan LSM internasional sehingga mereka dengan rela mau membangun rumah di Aceh Barat tipe 45 dari 36 M2 yang diwajibkan BRR.

“BPBA memerlukan sosok-sosok yang selalu siap, sigap, tanggap, dan terukur saat



Silaturahmi Bupati Aceh Besar dengan Kalak BPBA, 13 Mai 2018.



Silaturahmi dengan BMKG untuk



Kalak BPBA dan Kepala SAR Aceh, Hari Adi Purnomo SH. Foto bersama di Kantor SAR dalam rangka memperkuat kerjasama dua lembaga. Kunjungan Kalak BPBA ke Kantor SAR dilaksanakan pada tanggal 08 Mai 2018



Kalak BPBA buka puasa bersama dengan AFF pada tanggal 26 Mai 2018 di Lemur Cafe.

melaksanakan kerjasama dengan Pusat Penelitian Gempa dan Tsunami Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama TDMRC. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 08 Mai 2018 di Ruang Rapat Kalak BPBA dengan agenda pembahasan apa yang dapat dilakukan sinergitas antara BPBA dengan TDMRC.

Teuku Dadek mengharapkan agar para ilmuwan dapat berperan lebih signifikan dalam upaya memberikan peringatan dini khususnya gempa. “Seharusnya apa yang berlaku di Gayo menjadi kesiap siagaan di Pidie dan sekitarnya sehingga korban tidak banyak jatuh, jika ilmuwan bisa memberikan peringatan dini tentunya hal ini sangat berguna” ujar Dadek.

Sementara itu Ketua TDMRC, Dr. Khairul Munadi, M.Eng mengatakan bahwa TDMRC sangat ingin agar BPBA dan TDMRC dapat



Bersama Bapak Nurdin Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh pada tangga; 14 Mai 2018.



Kunjungan Kalak BPBB Kota untuk proper Gedung evakuasi.



Kalak BPBA melaksanakan koordinasi dengan Kepala Balai Jalan dan Jembatan Aceh, H Subki.

menghadapi berbagai kondisi terburuk. Kunci kekuatan itu ada pada koordinasi dan sinergitas dengan berbagai unsur, termasuk dengan organisasi dan relawan kebencanaan. Dari apa yang saya lihat dan catat selama ini, saya pikir Teuku Dadek memiliki kemampuan untuk itu,” demikian Nasir Nurdin menanggapi sosok yang juga mantan wartawan dan editor Serambi Indonesia ini. (***)



Pembahasan rancangan akhir renstra BPBA tanggal 26 Juni 2018 di Aula BPBA bersama Stakeholder dan Kabupaten Kota.

Membahas Renstra Dengan Stakeholder

Dalam upaya memperkaya dan menguatkan keterkaitan Renstra BPBA dengan visi dan misi Gubernur Aceh, BPBA melaksanakan FGD dengan seluruh Kalak BPBD dan pihak terkait terutama Tim RPJM Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

Kasubbag Program Fadmi Ridwan mengatakan bahwa BPBA fokus menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat dengan strategi meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah. Menurut Fadmi, ada tiga isu besar terkait bencana alam, yaitu banjir/genangan dan abrasi pantai, masih tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB), dan masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana. (nas)

Dalam FGD tersebut berkembang berbagai isu, terutama menyangkut pendanaan. Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek SH, menyarankan pihak BPBD kabupaten/kota agar pintar mengelola dan memanfaatkan dana kebencanaan yang ada di Aceh, baik yang bersumber dari Dana Otonomi Kabupaten/Kota maupun dana yang ada di DPA BPBA.

“Tidak semua BPBD Kabupaten/kota mendapat alokasi dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) padahal BPBD masih membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan seperti mobil pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran lahan, rescue dan lainnya,

termasuk untuk fisik pembangunan gudang, pos pemadam kebakaran, gedung evakuasi, kendaraan rescue, kendaraan angkut relawan dan dapur umum,” kata Dadek ketika memimpin Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) BPBA 2018-2022 dengan BPBD Kabupaten/kota, Unsur Pengarah BPBA, Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh, dan RAPI Aceh di Aula Kantor BPBA, Banda Aceh, Selasa (26/6).

Ahmad Dadek menjelaskan, sumber dana APBA dapat dimanfaatkan oleh BPBD dengan cara harus masuk melalui Musrenbang, kemudian syarat tanah, DED dan RAB juga harus ada, “Banyak BPBD kabupaten/kota yang tidak memanfaatkan Musrenbang untuk mendapatkan dana kebencanaan di APBA” kata mantan Ketua Bappeda Aceh Barat tersebut. “BPBD harus pintar mengelola dan memanfaatkan sumber dana termasuk yang ada di BNPB baik dana RR dan dana siap pakai” lanjutnya.

Unsur Pengarah BPBA yang juga Dewan Pakar Forum PRB Aceh, DR Dirhamsyah menambahkan, Renstra BPBA perlu dilakukan penambahan terutama perlu dipertegas peran BPBA dan BPBD dan dimakukkan peran Unsur Pengarah serta

keterlibatan swasta seperti Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Menanggapi itu, Kalak BPBA mengatakan, penanganan dana CSR di provinsi menjadi salah satu program Gubernur Aceh agar CSR ini bisa dikelola. Saat ini Qanun CSR sudah ada namun belum bisa diterapkan. “Kita perlu koordinasi lagi dengan pihak swasta bagaimana agar dana CSR itu masuk dalam pendanaan bencana,” tandas Ahmad Dadek.

**Wery Tim RPJMA:
Baru Pertama SKPA yang Bahas Renstra Dengan Stakeholder**

Kami hadir dalam forum ini mewakili Tim penyusun RPJMA 2017 – 2022. Kami mengapresiasi kegiatan FGD Rankhir Rentras BPBA 2017 – 2022, yang digagas oleh Kepala Pelaksana BPBA. Ini merupakan forum yang sangat penting dan merupakan proses penyusunan Renstra



SKPA dilindungi Pemerintah Aceh yang pertama yang secara langsung melibatkan BPBD kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi ide, pikiran dan lain-lain agar Renstra BPBA dapat dioperasionalkan.

Inti pokok dari proses penyusunan Renstra SKPA semacam ini adalah bagaimana unit kerja horizontal dan vertikal saling mendukung program, kegiatan dan sasaran sehingga indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017 – 2022 dapat diwujudkan. Sebagai informasi umum, perlu kami sampaikan kepada Saudara semuanya bahwa kondisi hari ini per 12 April 2018, RPJMA 2017 – 2022 *legal standing* masih dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018. Dokumen induk perencanaan pembangunan Aceh wajib ini di sepakati oleh eksekutif dan legislatif dan di qanun kan. Kami yakin dalam beberapa waktu kedepan proses tersebut dapat berjalan lancar. Kita semua berharap agar prosesnya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

RPJMA 2017 – 2022 merupakan inspirasi untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan di kabupaten/kota dan di konkritkan dalam RPJMK, sehingga kewenangan Kabupaten/kota yang terkait penanggulangan bencana dapat di tertampung dan jika memungkinkan akan di didukung dengan APBA dengan terlebih dahulu di alokasikan dalam RPJMA 2017 – 2022. Sehingga menjadi harapan kita semua komitmen polituik Pimpinan Daerah Aceh periode 2017 – 2022 dapat dijalankan dan mendapat dukungan oleh semua pihak termasuk didalamnya dukungan dari Bupati/Walikota selaku pimpinan daerah bawahan Gubernur Aceh. Demikia official statement kami selaku representasi tim penyusun RPJMA 2017 – 2022. (fadmi)

Sewindu BPBA

“Krue Seumangat “ Selamat Hari Bakti BPBA yang ke 8 (22 Juni 2010 - 22 Juni 2018). Sewindu telah berlalu tempat kita Berbakti Kepada Nusa & Bangsa. Suka Duka kita lalu bersama kiranya tetap TANGKAS, TANGGAP & TANGGUH dalam Visi Misi Aceh Hebat. Itulah WA Ibnu Sakda, salah satu dari sedikit staf BPBA yang masih bertahan di BPBA. Sebentar lagi Ibu Sakda yang biasa disapa Pak Guru akan memasuki masa pensiun. Ibnu Sakda sudah sejak awal berkiprah di BPBA sudah banyak kerja lapangan yang diikuti dari Gempa Gayo sampai ke Gempa Pidie.

Sudah delapan tahun keberadaan BPBA, sudah banyak hal yang dilakukan seperti penanganan gempa Gayo, Pidie dan Banjir Bandang di Tangse. Kini BPBA semakin dewasa seiring dengan perkembangan waktu. Sejak dibentuk BPBA dipimpin

Asmady Sjam yang meletakkan dasar dasar penanggulangan bencana di Aceh, kemudian beliau diganti oleh Jarwansyah yang kemudian pindah menjadi salah satu Direktur di BNPB Jakarta, Jarwansyah diganti dengan Rizal Aswandi yang berhasil membangun gudang. Rizal diganti dengan Said Rasul yang sudah aktif membantu rehab rekon gempa Pidie, kemudian Said Rasul digantikan oleh Yusmadi yang kemudian menjadi Kepala PUPR Aceh Besar dan terakhir tanggal 16 April 2018 dilantik HT Ahmad Dadek, SH yang merupakan hasil fit and propeties.

Dibentuk 22 juni 2010

Gempa dan tsunami Aceh 2004 telah membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam penanganan kebencanaan di dunia dan Indonesia. UU Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Kebencanaan juga terbit karena pengaruh kejadian terbesar dalam sejarah dunia itu. BPBA dan BPBD kabupaten/kota dibentuk atas UU tersebut. Sebelumnya penanganan bencana di Indonesia tidak bersifat sistematis dan struktural karena penanganan pada saat bencana terjadi dan tidak bagian dari kewenangan birokrasi tetapi hanya satu kepanitiaan saja.

Tanggal 22 Juni 2010 untuk pertama kalinya BPBA esis dengan dilantik Kepala Pelaksana pertama Bapak Drs Asmady Syam. Dalam sejarah keberadaannya, BPBA sudah menangani bencana level propinsi dan nasional seperti banjir bandang di Tangse, Gempa Gayo dan Pidie Jaya, Pidie dan Bireun. BPBA juga mendapatkan beberapa penghargaan dari lembaga dan BNPB. (**Henny**)

Tahukah Anda Siapa Kepala BPBA

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan juga seluruh Indonesia dijabat oleh Sekretaris Daerah. Artinya Sekda baik di propinsi dan kabupaten/kota secara exxoficio adalah Kepala BPBD. Sedangkan Kepala Pelaksananya ditunjuk untuk memimpin SKPD tersebut. Secara aturan perundangan baik pusat maupun daerah Drs. Dermawan MM Sekda Propinsi Aceh adalah Kepala BPBA sedangkan HT Ahmad Dadek adalah Kepala Pelaksana BPBA.

Mengapa strukturnya demikian? Karena BPBD salah satunya adalah lembaga komando, terutama saat terjadi bencana, karena itu, kepalanya ditunjuk pejabat yang punya eselonering yang lebih tinggi untuk memudahkan jalannya peran dan fungsi penanggulangan bencana.



Wagub, Bapak Nova Iriansyah melantik Kalak BPBA pada tanggal 16 April 2018

Pelantikan Kalak ke VI

Wakil Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah Melantik 6 pejabat utama eselon II A di gedung serbaguna Setda Aceh pada Senin 16 April 2018 sebagai kepala satuan kerja pemerintah Aceh. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek, SH. Dadek merupakan Kalak BPBA yang ke VI sejak BPBA dibentuk tahun 2008. Dadek mengikuti *fit and propeties* dan lolos tiga besar serta dipilih untuk dilantik.

HT. Ahmad Dadek, SH dilahirkan di Meulaboh, 29 November 1968, lulus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 1992

Yogyakarta dengan prediket *cumlaude*. Pernah menjadi Camat Johan Pahlawan saat satu tahun sebelum tsunami 2004 dan dua tahun setelahnya. Dadek pernah memegang jabatan Kepala Pelaksana BPBD, Plh Kepala Dinas Pendidikan, Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh Barat, terakhir sebagai Kepala Bappeda Aceh Barat.

HT Ahmad Dadek, SH juga sering diundang sebagai nara sumber menyangkut kebencanaan diantaranya Kepada para Camat di Aceh Jaya dalam rangka mengalang kerjasama dengan LSM asing, yang dibiayai oleh UNDP 2005, pemateri

Mitigasi Bencana bagi BPBD Seluruh Indonesia, 2011, Pengurangan Risiko Bencana TDMRC 2011, Peran BPBD bagi BPBD Se Aceh yang diselenggarakan oleh BPBA 2012, Peran BPBD kepada BPBD Nias Selatan oleh UNDP 2011.

Dadek juga pernah menjadi nara Sumber pertemuan negara selatan – selatan tentang Bencana November 2011, pidato tsunami di depan Presiden dan Masyarakat Singapore, kunjungan Ke Negara Bagian Arizona dan Kentucky USA dalam rangka promosi tsunami dan Sister City 2006, Ke Jepang dalam rangka Pemateri dalam Kegiatan Rehab dan Rekon di Jepang 2012.

Dadek juga sudah menulis dua buku tentang pengalamannya dalam melaksanakan rehab rekon yaitu Tsunami Kasih 2015 dan Ie Beuna 2014, Dadek juga sering menulis di media nasional dan luar negeri termasuk di The Djakarta Post.

Selama menjawab Camat dan Kalak BPBD Aceh Barat Dadek berhasil menjadikan Kota Meulaboh sebagai kota yang siaga bencana dimana Dadek bersama dengan NGO membangun Gedung Evakuasi dengan memanfaatkan lahan kosong untuk pertokoan.

Adapun prestasi yang pernah diraih :

- BPBD Terbaik Indonesia Tahun 2012 dari Kepala BNPB Indonesia (Tiga kategori dari enam kategori yang dipertandingkan) yaitu Juara II Tanggap Darurat Nasional, Juara I Pra Bencana Tingkat Nasional, Juara I Kesiap Siagaan Nasional sehingga BPBD Aceh Barat menjadi juara nasional sebagai BPBD Terbaik Indonesia.
- Anugerah Terbaik I RKPDR PROF DR A Majid Ibrahim
- Anugerah Terbaik I RKPDR PROF DR A Majid Ibrahim
- Anugerah Terbaik I RKPDR PROF DR A Majid Ibrahim
- Pamripta Purnakarya (RKPDR) Terbaik III SE INDONESIA
- Pamripta Purnakarya (RKPDR) Terbaik I SE INDONESIA
- TOP 99 SINOVIK CSR Untuk Rakyat
- TOP 99 SINOVIK CSR Untuk Rakyat

Dadek juga dikenal aktif dalam proses rehab rekon di Meulaboh yang dimulai dari Camat, dimana dia digelar sebagai Fixer Man oleh Badan UN karena berhasil melakukan konsolidasi rehab rekon dengan LSM Internasional sehingga mereka dengan rela mau membangun rumah di Aceh Barat Tipe 45 dari 36 M2 yang diwajibkan BRR.



Drs Asmady Syam (2010 sd 2012)



Dr Jarwansyah (2012 sd 2014)



Ir Rizal Aswandi (2014)



Said Rasul (2014 sd 2017)



Ir Yusmadi (2017 sd 2018)

100 Hari Kerja Kalak BPBA

Saat dilakukan wawancara pada tanggal 14 April 2018 oleh Bapak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang didampingi Sekda Aceh

Drs Dermawan MM, HT Ahmad Dadek, SH ditanya oleh Pak Gubernur apa yang akan Saudara (Dadek) lakukan jika dipercaya

menjadi Kalak BPBA.

Dadek terus mengambil presentasi yang sudah disiapkan untuk dijelaskan kepada Bapak Gubernur, inilah yang kemudian dijadikan oleh HT Ahmad Dadek, SH sebagai pijakan kerja 100 hari ini sejak dilantik pada

tanggal 16 April 2018 oleh Bapak Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Nova Iriansyah di Aula Serbaguna Kantor Gubernur/

Ini hasil evaluasi program kerja seratus hari tersebut.

NO	PROGRAM 100 HARI	REALISASI
1.	Konsolidasi staf, kalak kab/kota dan dewan pengarah serta forum PRB untuk penuntasan agenda 2018 (sosialisasi program 2018 dan rencana 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan, kegiatan dapat dilihat dalam tabloid ono
2.	Koordinasi dan konsolidasi stakeholder terkait (BMKG, TDMRC, Kepolisian, SAR, TNI, RAPI, TAGANA, dll, organisasi kebencanaan lainnya baik partai maupun ormas)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan dengan disepakatinya dan ditanda tangani MOU dengan TDMRC, BMKG dan Dinsos. Telah dilaksanakan rapat dengan TDMRC, Forum PRB dan RAPI yang menghasilkan beberapa kesepakatan anggaran
3.	Penuntasan Renja dan DPA 2018, Renstra 2017-2022, Renja 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan pembahasan Renstra dengan Stakeholder yang ada, termasuk penuntasan Renja 2019
4.	Pembentukan task force pencegahan dan kebakaran lahan dan hutan (kab/kota dan propinsi)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan rapat dan implemtasi.
5.	Identifikasi WMK dan kapasitas pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan.(daftar kapasitas, armada, peralatan dan waktu tempuh)	<ul style="list-style-type: none"> Draf Surat Gubernur agar BPBD Kabupaten/kota mendapatkan pendanaan dari dana otonomi khusus kabupaten/kota minimal Rp. 3 M.
6.	Identifikasi wilayah kebencanaan untuk penyusunan master plan penanganan terpadu dan hijau. (list daftar kawasan bencana)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya sudah ada dalam Renja 2019
7.	Identifikasi pemanfaatan CSR untuk kesiap-siagaan dan tanggap darurat (bersama dinsos dan bappeda, masuknya program bencana di CSR)	<ul style="list-style-type: none"> Sedang diijak dengan Dinas Sosial Aceh
8.	Merintis pelaksanaan pengabdian (KKN) perguruan tinggi bidang kebencanaan (mou)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah diijak dengan UIN
9.	Identifikasi kebutuhan aturan bidang kebencanaan (list aturan yang perlu diterbitkan dan dievaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> Sedang disiapkan 9 Draf Pegub
10.	Identifikasi ketersediaan dan fungsi escape building dan pemanfaatannya (list keberfungsian dan penggunaan hari-hari serta kebutuhan)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung proper Kalak BPBD Kota Banda Aceh, Belum Tuntas

Kerja Seratus Hari 16 April Sd 25 Agustus 2018

Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

- Index Bencana Kabupaten/kota Tersedia
- Rancangan Akhir Renstra Selesai
- Renja 2019 Selesai
- Tim Reaksi Cepat Aceh dan Satgas Tim Reaksi Cepat BPBA Terbentuk
- Pergub tentang Peta Kajian Tuntas
- SK Gubernur tentang Siaga Bencana
- Kebakaran Hutan dan Lahan Terbentuk
- Empat Buah MOU (TDMRC, BMKG, IOX dan DINSOS)
- Dana untuk Forum PRB di 2019 tersedia
- Dana untuk perkuatan Satgas Komunikasi 2019 Tersedia
- Realisasi Keuangan =
- Lelang 95 % Tuntas

- Rapat konsolidasi dan Koordinasi dengan Kalak BPBD sebanyak tiga kali
- Seminar Bersama TDMRC dan BPBA tentang Gempa dan Tsunami.

KEDARUTAN DAN LOGISTIK

- Penanganan Bencana Sumur Minyak di Aceh Timur bersama Dinas Sosial Aceh
- Pemberian Bantuan Logistik untuk Banjir Bandang di Aceh Tengah
- Penanganan Pengungsi Rohingnya
- Pembangunan Hunian Sementara Pesantren terbakar
- Penangan Kharhutla dengan BPBD Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh

Barat

PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAAN

- Penerbitan Tabloid Sigana
- Simulasi di Pulo Aceh Terlaksana
- Himbau Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

REHAB REKON

- Pembangunan Jembatan dan Jalan senilai Selesai
- Perubahan Rencana Aksi RR Pidie, Pidie Jaya dan Bireun
- Upaya Pelestarian Gua Eek Lunttie on going

NO	PROGRAM SATU TAHUN	STATUS
1.	Mengatur ulang manajemen perawatan dan kesiap siagaan peralatan bencana dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Sedang disiapkan profile peralatan SK TRC dalam proses SK Satgas sudah ada
2.	Peraturan gubernur tentang dana siap pakai, kontojensi plan	<ul style="list-style-type: none"> Sedang disiapkan dengan jumlah sembilan Pergub
3.	Review dan implementasi PRB-RAD Aceh	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Perubahan 2018
4.	Rekrutmen dan sertifikasi relawan kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum berproses
5.	Peraturan Gubernur tentang simulasi di tempat umum dan sekolah siaga bencana	<ul style="list-style-type: none"> Belum berproses
6.	PRB dalam perencanaan dan penggaran di SKPA terkait	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada di anggaran 2019
7.	Penyusunan master plan daerah rawan bencana yang perlu ditangani secara terpatu	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada di anggaran 2019
8.	Penyusunan beberapa peraturan ttg mitasi bencana baik dalam bentuk qanun maupun perbup (bahaya kebakaran lahan dan pemukiman, sistem peringatan dini di lembaga publik dll)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada 9 Pergub Juga Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan
9.	Perbaikan mekanisme respon tanggap darurat bencana (misalnya bantuan shelter bagi korban bencana kebakaran perlu disiapkan)	<ul style="list-style-type: none"> Belum proses
10.	Penetapan dan peningkatan kapasitas tentang jalur evakuasi, simulasi dan alat peringatan pencegahan gempa dan kebakaran di hotel, gedung-gedung pemerintah dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> Belum proses
11.	Simulasi bencana dan sekolah siaga bencana	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada di anggaran 2019
12.	Desa tangguh mell pemanfaatan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada di anggaran 2019 Sudah dikoordinasikan dengan DPMG
13.	Sosialisasi dan meningkatkan kapasitas (SDM dan alat) penanggulangan kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada di anggaran 2019
14.	Membuat MOU dengan TDMRC untuk membangun peringatan dini melalui kajian para ilmuan (jangan sampai kasus pidie tidak menjadi pelajaran dari takengon)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada MOU Sudah ada di anggaran 2019
15.	Pemberdayaan CSR dunia usaha untuk mitigasi bencana dan aceh green.	<ul style="list-style-type: none"> Sedang berproses
16.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran BPBA berbasis gender sesuai dengan amanah Perka BNPB Nomor 13 tahun 2014 dan Pergub Aceh nmor 6 tahun 2014.	<ul style="list-style-type: none"> Sedang berproses



Suasana pertemuan dengan Asesor Jica Jepang dengan BPBA.

Kunjungan dari Negara Sahabat



Peserta International Workshop On Management for Countries in The Regions of Pacific, Africa, Europe, South America and Carribean 2018 berpose di depan Kantor BPBA pada Tanggal 23 April 2018.

Jica

Pada tanggal 17 April 2018, BPBA mendapatkan kunjungan Tim Asesor JICA dari Jepang di ruang Pusdatin BPBA. Tim diterima langsung oleh Kalak BPBA, HT Ahmad Dadek, SH. Adapun tujuan dari kunjungan ini mereka ingin melihat kegiatan apa yang masih diperlukan dalam upaya meningkatkan kesadaran bencana masyarakat. Kalak BPBA HT Ahmad Dadek, SH yang didampingi Sekretaris, Drs Lutfandi dan kapid lainnya mengatakan penguatan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan BPBA dan masyarakat Aceh untuk pengurangan risiko bencana.

Tamu TDMRC

Sebanyak 13 negara mengikuti workshop manajemen bencana yang diselenggarakan oleh Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala. Kegiatan yang bertajuk: International Workshop On

Management for Countries in The Regions of Pacific, Africa, Europe, South America and Carribean 2018 ini dilaksanakan di Kryiad Muraya Hotel. (Senin, 16/4).

Ketua Panitia Ibnu Rusdi mengatakan, workshop ini merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Unsyiah. Di mana para pesertanya berasal dari negara yang memiliki kondisi geologis yang sama dengan Aceh. "Negara-negara tersebut berasal dari kawasan dengan risiko bencana yang tinggi seperti negara di kawasan Asia Pasific," ujarnya.

Pada tanggal 23 April 2018 peserta melaksanakan kunjungan ke Kantor BPBA untuk mendapatkan penjelasan tentang peran dan fungsi BPBA dalam konteks penanggulangan bencana Aceh. Kalak BPBA memberikan penjelasan tentang upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana.

Tujuh Mahasiswa USA

Tujuh mahasiswa dari Princeton University di AS yang sedang mempelajari Bahasa Indonesia dan budaya-budaya Indonesia melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada tanggal 18 Juli 2018. "Kami mau belajar di Aceh tentang kejadian tsunami di sini dan efek-efek kepada orang-orang lokal" ujar Sebastian ketua rombongan.

Para mahasiswa tersebut mendapatkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBA, HT Ahmad Dadek, SH tentang kejadian gempa dan tsunami 2004 bahwa Aceh sudah semakin baik, namun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan. Para mahasiswa juga melaksanakan pertemuan di TDMRC sebuah pusat penelitian gempa dan tsunami. Disana mahasiswa/i mendapatkan informasi tentang gedung evakuasi, rumah tahan gempa dan situs RSU Meraxa. "Kami mau belajar tentang disaster management di Aceh sekarang"

ujar Sebastian.

Tujuh mahasiswa dari Princeton University di AS yang sedang mempelajari Bahasa Indonesia dan budaya-budaya Indonesia melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada tanggal 18 Juli 2018. "Kami mau belajar di Aceh tentang kejadian tsunami di sini dan efek-efek kepada orang-orang lokal" ujar Sebastian ketua rombongan.

Para mahasiswa tersebut mendapatkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBA, HT Ahmad Dadek, SH tentang kejadian gempa dan tsunami 2004 bahwa Aceh sudah semakin baik, namun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan. Para mahasiswa juga melaksanakan pertemuan di TDMRC sebuah pusat penelitian gempa dan tsunami. Disana mahasiswa/i mendapatkan informasi tentang gedung evakuasi, rumah tahan gempa dan situs RSU Meraxa. "Kami mau belajar tentang disaster management di Aceh sekarang"



Para Mahasiswa/i Princeton, USA saat berkunjung ke BPBA dalam upaya belajar masalah perencanaan pada 18 Juli 2018.



Wakil Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah memberikan bantuan masa panik kepada Tgk Syukri Wali sebagai pimpinan Dayah Yaqhdah Labuhan Haji yang terbakar pada bulan puasa. Tampak Bapak Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Al Hudry dan Kalak BPBA HT Ahmad Dadek yang pada kesempatan itu membantu membantu hunian sementara bagi santri, acara berlangsung di lokasi pondok pada bulan puasa tanggal 6 Mei 2018.

Penanganan Bencana

(16 April sd 25 Juli 2018)

Kemitraan Dengan DINSOS Aceh Diperkuat



Kalak BPBA foto bersama setelah memberikan materi untuk Tagana.

Alhudry yang sudah menjadi Kepala Dinas Sosial sejak 2015 mengatakan bahwa selama karirnya menjabat Kepala Dinas Sosial baru kali ini BPBA dan Dinsos benar-benar satu tubuh. “Sekarang tidak ada lagi ego SKPA, yang ada pemerintah Aceh” ujar Al Hudry.

Hubungan Dinas Sosial dan BPBD baik di level kabupaten/kota maupun propinsi memang perlu dipertegas apa yang menjadi tugas Dinsos dengan Tagananya dan BPBA dengan Satgasnya. Kalak BPBA dan Kepala Dinas Sosial Aceh sepakat untuk menuangkan peran masing-masing ke dalam sebuah MoU yang disepakati.

Secara general peran BPBA pada masa darurat adalah melakukan komando dan koordinasi, jadi kebutuhan masa panik, BPBA menyerahkan sepenuhnya kepada Dinsos baik di level propinsi dan kabupaten/kota bahkan Dinsos mempunyai peran disamping memberikan kebutuhan pangan, sandang dan papan kepada korban bencana dengan mempedomani data yang diberikan BPBA.

Jika kebutuhan tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh Dinas Sosial, maka BPBA berkewajiban untuk menutupi kebutuhan tersebut, terutama yang berkaitan dengan masa darurat baik pangan, sandang maupun papan.

Kalaborasi antara Dinsos dan BPBA ini sudah ditunjukkan pada kegiatan penanganan bencana di Sumur Minyak di Aceh Timur, Banjir Bandang di Takengon, pengungsi Rohingnya di Bireun dan kebakaran Dayah Yaqhdah di Labuhan Haji.



Kanan, titik sumur minyak dan kondisi sekitar sumur minta setelah melendak, Kalak BPBA berada di salah satu sumur minyak masyarakat.



Tagana dan Relawan BPBD Harus Bersatu

Kepala Pelaksana BPBD Aceh HT Ahmad Dadek SH mengatakan bahwa Tagana dan Relawan BPBA ataupun Dinsos dan BPBA harus bersinergi dalam penanggulangan bencana. “kita satu bendera dan harus bersatu sebab bencana penanggannya perlu banyak orang dan kerja sama” tegas Dadek 12 Juli 2018 di Hotel Seventen Banda Aceh pada acara pelatihan koordinator Tagana se Aceh.

Dadek khusus datang untuk berkenalan dengan penyintas bencana karena baru menjabat kepala Pelaksana BPBA. Prinsip bencana dan fase bencana mulai pra bencana, saat bencana dan rehabrekon. Dulu masyarakat kita belum bisa membedakan masing-masing fase tersebut.

Belajar dari bencana tsunami Aceh 26 Desember 2004 mengilhami untuk menulis buku kebencanaan berdasarkan pengalaman pribadi antara lain judul

gempa dan ie beuna, tsunami kasih dan berbagai tulisan di media baik lokal, Nasional maupun internasional. Program Pembangunan pemerintah Aceh Irwandi-Nova terkait kebencanaan adalah Aceh Green. Penegasan terkait pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap risiko bencana dengan konsep pembangunan Antara lain green growth plan.

Seperti acara hari ini dan setiap acara dilaksanakan didalam sebuah gedung maka SOP keselamatan pihak penyelenggara wajib menyampaikan langkah langkah kesiapsiagaan dan evakuasi bencana. Beda dengan Jepang sikap mereka sudah siap menghadapi bencana karena kesadaran masyarakat terhadap bencana sudah terbangun. Memikirkan mobil menghadap jalan dan sandal saja posisi menghadap keluar.

Hubungan BPBA dengan Dinsos ada-

lah BPBA bertanggung jawab mengkoordinasikan. Dan Dinsos mempunyai tugas pemberdayaan, kesejahteraan serta bantuan sosial kepada masyarakat. Seperti kejadian kebakaran sumur minyak di Aceh timur Dinsos memberikan bantuan masa panik serta pemberian santunan atau uang duka. Jadi antara BPBA dengan Dinsos saling bersinggungan pada masa panik sampai masa rehab rekon.

Tanggapan positif dari seluruh koordinator TAGANA kabupaten kota atas kehadirannya dihadapan mereka. Sinergitas dan koordinasi lebih terbangun karena bencana melibatkan multipihak. Baru hari ini saya mendengar langsung Kalaksa BPBA menyampaikan bantuan masa panik serahkan kepada Dinsos kata salah seorang koordinator TAGANA kabupaten Aceh Barat. Mudah mudahan sinergitas ini terus terjaga. Pengalaman penanganan gempa bumi



Kanan, perahu pengungsi saat terdampar, Tim Propinsi khususnya Bapak Wakil Gubernur melakukan koordinasi dengan UNHCR yang didampingi Kalak BPBA dan Kadis Sosial Aceh pada tanggal 24 April 2018.





Wakil Gubernur Aceh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh dan Kalak BPBA memberikan Bantuan kemanusiaan yang diserahkan melalui Wabup Bireun. (24 April 2018)

Pidie jaya menjadi cemeti buruknya koordinasi antara BPBA dengan Dinsos agar kedepannya tidak terjadi lagi.

Ledakan Sumur Minyak

Bencana Kebakaran Sumur Minyak Masyarakat di Gampong Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak, Aceh Timur terjadi 25 April 2018 pukul sekitar pukul 24.00 WIB. Bencana diawali dengan keluarnya minyak dan gas dari sumur yang dibor secara tradisional yang terletak di lahan milik warga Zainabah. Pada saat yang bersamaan datang sekelompok warga, untuk mengambil minyak yang keluar (leles). Adapun sekelompok warga yang sedang mencari minyak mentah tersebut jumlahnya lebih dari 10 orang. Melihat adanya tumpahan minyak yang tidak tertampung, warga beramai-ramai datang ke lokasi untuk mengambil minyak tersebut. Namun setelah beberapa saat kemudian, tepat pukul 01.30 WIB terjadi ledakan yang menimbulkan korban jiwa 25 orang meninggal dunia, 33 orang luka luka dan lima rumah hangus terbakar.

Semburan api pada sumur yang meledak sudah padam sejak Kamis (26/4) sekitar pukul 7 pagi, namun masih tersisa semburan air/lumpur. Pada sumur tersebut masih terlihat tekanan reservoir yang tinggi. Semburan air tersebut diperkirakan masih mengandung gas dan diharapkan kandungan hidrocarbon dibawah flamability limit.

Mengingat masih ada aktivitas gas di dalam semburan, maka lokasi tersebut masih berbahaya. Konsentrasi gas dapat meningkat sewaktu-waktu khususnya pada malam hari. Penduduk harus hati-hati dengan api dan tetap menjaga jarak aman.

Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Dinas Sosial Aceh memberikan bantuan berupa: pangan, sandang, peralatan dapur, perlengkapan makan, paket kesehatan keluarga, tikar, selimut, terpal, kidswear dan paket sandang.

Pada hari kejadian BPBD mengerahkan 4 (empat) unit armada Damkar dan di bantu Oleh Personil TNI,Polri, Tim Riaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan pemadaman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Pembuatan saluran minyak dan air untuk menghindari luapan minyak

Sejak 27 April s.d. laporan ini dibuat (4

Mei 2018) dilakukan penyedotan minyak pada saluran-saluran minyak oleh pihak Pertamina untuk menghindari luapan ke minyak ke pesawahan yang letaknya hanya dipisahkan oleh jalan.

Pemantauan 24 Jam melalui Pusdalops BPBD Aceh Timur dan Pusdalops BPBA, Kunjungan Tim BPBA bersama Tim Gubernur, Pemantauan Korban baik yang lagi dirawat dan yang meninggal, Koordinasi dengan instansi terkait PB memastikan penanganan lokasi dan masyarakat.

Pada tanggal 20 April 2018, Sebanyak 79 warga etnis Rohingya terdampar di Pantai Kuala, Bireuen, Aceh, sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka diselamatkan oleh nelayan, dan begitu tiba di daratan, para pengungsi ini ditempatkan di sebuah tempat di kawasan Pantai Kuala. Pengungsi Rohingya yang diselamatkan ini terdiri atas 44 laki-laki, 27 perempuan, dan 8 anak-anak. Mereka dievakuasi dari satu boat, dan Sorang di antaranya dalam kondisi sakit sehingga harus diinfus di lokasi.

Pengungsi ditampung di tempat penampungan sementara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu, Bireun, di bawah pengawasan Pemkab Bireuen dalam hal ini Dinsos Bireun dan BPBD Bireun serta instansi terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Para pengungsi melakukan kegiatan sehari-hari di bawah pembinaan Dinsos Bireuen, BPBD, Iom dan UNHCR. Kondisi kesehatan pengungsi sangat baik.

Upaya penanganan adalah membuka dapur umum, pelayanan kesehatan, pendampingan kepada Rohingnya, menerima dan mendistribusikan bantuan logistik, sosialisasi kebersihan, kegiatan olah raga, komunikasi verbal, registrasi oleh UNHCR, kunjungan Tim BPBA dan Dinsos Aceh bersama Tim Gubernur, melakukan pemantauan pengungsi di tempat penampungan, koordinasi dengan instansi terkait PB memastikan penanganan lokasi dan masyarakat.

Kadis Sosial sudah membentuk kepengurusan posko dari sudut bantuan kemanusiaan 3 juga diinstruksikan agar masyarakat tidak berbaur dengan pengungsi agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan 4 pakaian bekas yang mereka pakai di kapal agar dimusnahkan 5 pihak kabupaten Bireun sdh melayani kebutuhan makan

minum tempat kesehatan 6 harapan agar pihak berwenang imigrasi UNHCR dan kementerian luar negeri segera memikirkan status selanjutnya mereka demikian laporan terima kasih

Banjir Bandang Aceh Tengah

Minggu (22/4/18), hujan lebat terus mengguyur wilayah Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah. Akibatnya, lima Gampong (Desa) di kawasan itu terendam banjir setinggi 50 sentimeter dan merendam perumahan warga. Ada 134 warga dari 43 Kepala Keluarga (KK) terpaksa harus mengungsi ke rumah penduduk sekitar dan rumah keluarga masing-masing.

Berdasarkan informasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, Senin (23/4/18), kelima gampong yakni; Pedekok, Suka Damai, Erelap, dan Kampung Kedelah, sementara, akibat hujan melanda kawasan tersebut sejak Minggu pagi, sehingga debit air di irigasi melebihi kapasitas, sehingga meluap dan masuk ke rumah warga. Kini, petugas BPBD dan tim TRC serta petugas Damkar Aceh Tengah sedang meninjau ke tempat kejadian. Di sana, mereka membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah warga, sekaligus mendata rumah yang terkena banjir. Tidak ada korban dalam kejadian itu, akses jalan menuju Takengon dan sebaliknya masih normal.

Dayah Terbakar

Musibah kebakaran kembali terjadi pada malam Ramadhan di Aceh. Pada tanggal 4 Juli 2018 dinihari kebakaran terjadi di Kompleks Pesantren Nur Yaqdha, Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan. Percikan api yang berasal dari salah satu rangkang santri merembet ke tempat lain sehingga menghanguskan 54 bilik rangkang. “Kerugian terbesar lainnya yang dialami pihak santri adalah seluruh pakaian santri yang ditinggal dalam rangkang, termasuk ribuan kitab ikut serta terbakar,” kata Tgk Syukri pimpinan dayah. Apalagi saat kejadian

para santri banyak yang sedang pulang kampung karena libur Ramadan. “Kita berharap ke depan kepada dewan guru dan para santri untuk lebih berhati-hati bila hendak memasang listrik, suruhlah pada yang ahlinya,” harapnya.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melalui Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyalurkan bantuan masa panik kebakaran untuk Dayah Nur Yaqdha di Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Selasa (05/06/2018). Turut mendampingi Wakil Gubernur, Sekda Aceh Selatan, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Teuku Ahmad Dadek serta sejumlah pejabat lainnya. Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sandang pangan berupa, pakaian, mukena, selimut, triplek, bahan makanan serta berbagai kebutuhan lainnya.

“Setiap musibah pasti ada hikmahnya, apalagi ini terjadi di sepertiga terakhir bulan ramadhan,” kata Nova usai menyerahkan bantuan yang diterima langsung oleh pimpinan Dayah. Nova meminta Dinas Sosial dan BPBA berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya untuk membantu membangun kembali bilik santri yang sudah terbakar. Nova berharap para santri dan pimpinan dayah agar tetap semangat dan bangkit kembali dari musibah tersebut.

“Mudah-mudahan aktifitas belajar mengajar bisa kembali seperti biasa, tentu dengan dukungan dari kita semua,” ujar Nova.



Pada tanggal 24 April 2018 Pukul 08-41-58 di Takengon, Wagub menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang melalui Bupati Aceh Tengah.

Nova juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini, Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah juga sudah menganggarkan anggaran senilai 1.2 milyar untuk Pembangunan Asrama Dayah Nur Yaqdha. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan, Dinas Sosial Aceh sebelumnya sudah menyalurkan bantuan masa panik melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. “Tapi atas perintah Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami diminta langsung turun ke lokasi kebakaran,” kata Hudri.

Pada kesempatan tersebut, kepala BPBA, Ahmad Dadek menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh melalui BPBA akan membangun hunian sementara senilai 200 juta sehingga aktifitas belajar usai libur nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Mekanismenya akan kami bicarakan lagi, apakah kami serahkan bahan bangunan atau melalui pihak ketiga,” ujar Dadek.

Dayah yang dipimpin oleh Tgk. Syukri Waly (Abu Muda) itu mengalami musibah kebakaran, senin (04/06/2018) dinihari. Puluhan bilik santri beserta pakaian dan ribuan kitab hangus terbakar. Kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa karena santri sedang libur ramadhan dan pulang ke kampung masing-masing. Adapun kerugian materil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (*)



Wagub melakukan peninjauan ke lokasi pesantren bersama dengan Kalak BPBA dan Kadis Sosial Aceh pada tanggal 05 Juli 2018 dan memberikan bantuan masa panik dan BPBA memberikan bantuan hunian sementara bagi korban kebakaran dayah.



Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sorong, Papua Barat (2018).

Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisa risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Setelah hampir 1 (satu) dekade upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah banyak kemajuan-kemajuan dan capaian-capaian dalam membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana.

Besarnya pencapaian penurunan risiko bencana perlu terus dimonitor dan evaluasi agar upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi risiko yang ada namun diharapkan dapat mencegah munculnya risiko-risiko baru.

Investasi PRB perlu selalu dilakukan secara fokus dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya

dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung kemajuan-kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana ini diperlukan komitmen yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta yaitu dengan mengadakan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan pada bulan oktober setiap tahunnya.

Di Indonesia, Bulan Peringatan PRB telah menjadi agenda nasional dan

dilaksanakan secara berturut di berbagai kota besar sebanyak 5 (lima) kali, yaitu di Kota Mataram, NTB (2013), Kota Bengkulu, Bengkulu (2014), Kota Surakarta, Jawa Tengah (2015), Kota Manado, Sulawesi Utara (2016), dan Sorong, Papua Barat (2017), dan tahun 2018 ini penyelenggaraan Bulan PRB dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah mengikuti 3 (tiga) kali pelaksanaan bulan Pengurangan Risiko Bencana, yaitu pertama di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, kedua di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan yang ketiga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pada pelaksanaan bulan Pengurangan Risiko Bencana yang keempat di Kota Manado tahun 2016, BPBA berhasil meraih Penghargaan Kategori Pengelolaan Website Terbaik dan pada

pelaksanaan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang kelima di Kota Sorong pada 2017 lalu, BPBA berhasil meraih Juara 2 Lomba Cerdas Cermat PRB antar BPBD se-Indonesia.

Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap aktivitas Pengurangan Risiko Bencana sebagai investasi untuk ketangguhan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kemitraan antar pelaku penanggulangan bencana di Indonesia, dan memberikan komitmen bersama antar pemangku kepentingan di Indonesia. (afz)



Kegiatan Aktivasi Sirine Setiap tanggal 26.